

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT, Alhamdulillah Tim Penyusun dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja(Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2021 beserta Sumber Dana Indikatif, Indikator dan Evaluasi Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja(Renja) Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu serta tolak ukur dalam merealisasikan Rencana Kerja yang direncanakan. Selain itu juga dapat membuka informasi tentang Rencana Kerja Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2021 dan sekaligus menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Belopa, Januari 2021

**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu**

ANWAR USMAN, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 198512 1 032

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan	1-6
1.4 Sistematika Penulisan	1-7
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	2-1
2.2 Analisa Pelayanan Perangkat Daerah	2-12
2.3 Isu-Isu Penting Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu	2-16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	2-35
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 3-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	3-2
3.3 Program dan Kegiatan	3-3
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	4-1
 BAB V PENUTUP	 5-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Luwu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020, maka sebagai tindak lanjut seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu harus segera menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan menjadikan RKPD tersebut sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Bahwa Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2021 terkait kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik, maka Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju yang mendukung suksesnya pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021, sesuai dengan surat Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Nomor: 005/ 43 /BAP/I/2021 pada tanggal 8 Januari 2021 tentang Permintaan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya melaksanakan analisis gambaran pelayanan, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal RKPD. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Luwu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam mendukung Misi ke 1 Bupati Luwu yaitu Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
25. Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2021 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah dan terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa 1 (satu) tahun mendatang; dan
4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan teknologi informatika, statistik sektoral dan persandian;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan teknologi informatika, statistik sektoral dan persandian; dan
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran Umum Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah agar Substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian Ringkas Tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah Dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/ Kota, Serta Tindak Lanjutnya Dengan Proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

2.2 Analisa Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2020 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana yang direncanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Rapat– rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Rapat– rapat Koordinasi dan Konsultasi / Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Aset

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dengan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

6. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

7. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Sosialisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

8. Program Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Kehumasan dan Layanan Informasi

Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik

9. Program Persandian

Pengamanan Sistem Komunikasi dan Informasi menggunakan Alat Pendukung

Persandian dan Perangkat Lunak lain

10. Program Peningkatan Pelayanan Informatika dan Komunikasi

Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik

11. Program Pengembangan Data Statistik Daerah

Koordinasi Pengembangan Data Statistik Daerah

Tabel yang perlu disajikan adalah table T-C29 yang disesuaikan dengan perangkat daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Luwu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.10.2.10.1.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.2.10.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi surat masuk dan Surat Keluar	960 Surat	437 Surat	414 Surat	414 Surat	100%	960 Surat	1811	2 %
2.10.2.10.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah penyediaan air / Listrik	1 Rekening	1 Rekening	1 Rekening	1 Rekening	100%	1 Rekening	1 Rekening	100 %

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021

2.10.2.10.1.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah jasa Pemeliharaan kendaraan Dinas / Operasional	4 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	4 Jenis	6 Jenis	1,5 %
2.10.2.10.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis bahan kebersihan yang disediakan	18 Jenis	5 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	18 Jenis	22 Jenis	1,3 %
2.10.2.10.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	13 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	13 Jenis	23 Jenis	2 %
2.10.2.10.1.01.15	Penyediaan bahan Bacaan,Peraturan Perundang – undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	18 Jenis	2 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	18 Jenis	35 Jenis	2 %
2.10.2.10.1.01.18	Rapat – rapat Koordinasi / Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat/ koordinasi yang dilaksanakan luar daerah	60 Kali	43 Kali	118 Kali	118 Kali	100%	60 Kali	221	4 %
2.10.2.10.1.01.19	Rapat – rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah rapat / Koordinasi yang dilaksanakan dalam daerah	187 kali	17 Kali	51 Kali	51 Kali	100%	187 kali	255 Kali	1,3 %
2.10.2.10.1.01.20	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Aset	Terlaksananya Penatausahaan dengan Baik dan Akuntabel	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

2.10.2.10.1.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.2.10.1.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
2.10.2.10.1.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor yang diadakan	10 Unit	83 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	10 Jenis	114 Jenis	11,4 %
2.10.2.10.1.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Ruangan	4 Ruangan	5 Ruangan	5 Ruangan	100%	2 Ruangan	11 Ruangan	6 %
2.10.2.10.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional berkala	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	2 %
2.10.2.10.1.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	30 Jenis	3 %
2.10.2.10.1.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur								
2.10.2.10.1.03.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ Latpim	-	-	-	-	100%	1 Orang	1 Orang	100%

2.10.2.10.1.05	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGA, PENGATURAN, DAN EVALUASI KINERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Laporan Keuangan tepat waktu								
2.10.2.10.1.05.01	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan panganggaran perangkat daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	7 Dokumen	2 %
2.10.2.10.1.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	2 %
2.10.2.10.1.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa								
2.10.2.10.1.15.02	Penyebarluasan Informasi Pembanguna Daerah	Informasi penyelenggaraan daerah tersampaikan	2 TV	1 TV	1 TV	1 TV	100%	2 TV	4 TV	2 %
2.10.2.10.1.15.04	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Persentase penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6 Jenis	3 %

2.10.2.10.1.15.05	Penyebarluasan informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terbentuknya KIM	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.1.20	PROGRAM PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika								-
2.10.2.10.1.20.01	Kehumasan dan layanan informasi	Persentase Kegiatan Pembangunan dan pemerintahan yang terdokumentasi	75%	25%	40%	40%	100%	75%	140%	2 %
2.10.2.10.1.20.02	Pengelolaan sumber daya dan layanan publik	Jumlah Sumber Daya Layanan Publik yang dikelola	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	4 Kegiatan	2 %
2.10.2.10.1.20.04	Tata kelola E-Government	Terlaksananya tata kelola layanan e-government sesuai standar layanan	-		-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.1.20.06	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio yang diadakan	6 Unit	-	13 Unit	13 Unit	100%	6 Unit	37 Unit	6 %
2.10.2.10.1.21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PPID)	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah								

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021

2.10.2.10.1.21.01	Penyusunan Kebijakan tata kelola keamanan informasi	Terselenggaranya penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%
2.10.2.10.1.21.02	Peningkatan kapasitas aparatur dibidang keamanan informasi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang	-	-	-	0	1 Orang	1 Orang	100%
2.10.2.10.1.21.03	Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi	Persentase keterhubungan perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi	90	80	80	80	100%	90	250	3%
2.10.2.10.1.21.04	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Terlaksananya layanan keamanan informasi	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100%	3 Layanan	9 Layanan	3 %
2.10.2.10.1.21.05	Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.10.2.10.1.21.06	Sistem komunikasi dan informasi menggunakan alat pendukung persandian dan perangkat lunak lain	Terkoneksinya sistem komunikasi menggunakan pendukung komunikasi	70	50	50	50	100%	70	170	2,4 %
2.10.2.10.1.22	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Capaian Pengelolaan Aplikasi Informatika								

2.10.2.10.1.22.02	Pengelolaan perangkat keras dan jaringan teknologi informasi, telematika serta data center	Terselenggaranya pengelolaan perangkat keras, jaringan, telematika dan data center	5 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan	640 Pack	250 Pack	320 Pack	320 Pack	100%	640 Pack	1210 Pack	2%
	Penyediaan ATK, Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Jenis Kebutuhan administrasi yang disediakan	14 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	14 Jenis	32 Jenis	2,2 %
	Penggandaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	-	39	-	-	0	-	-	0
2.10.2.10.1.22.03	Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikelola	5 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	3 Aplikasi	5 Aplikasi	100%
2.10.2.10.1.22.04	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan SDM pengelola IT DKISP dibidang teknologi informasi	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengelola IT DKISP		-	-	-		-	-	-
2.10.2.10.1.24	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik sektoral								
2.10.2.10.1.24.01	Pengumpulan data statistik sektoral	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	-	-	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021

2.10.2.10.1.24.02	Pengelolaan dan analisis data statistik sektoral	Terselenggaranya pengelolaan dan analisis data statistik sektoral	1 Dokumen	-	-	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 %
2.10.2.10.1.24.03	Koordinasi statistik sektoral daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	2 Kali	-	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	4 Kali	2 %

Belopa, Januari 2021
**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan Persandian
Kab.Luwu**

Anwar Usman, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198512 1 032

2.2. Analisis Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu Satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Luwu yang memiliki berbagai program dan kegiatan khususnya dibidang komunikasi dan informatika, tentunya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak bisa lepas dari pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 tahun 2011 tentang petunjuk teknis standard pelayanan minimal.

Untuk Mencapai target standar pelayanan minimal sesuai standar nasional, perlu didukung dengan upaya pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada indikator sasaran persentase. Sedangkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci serta disajikan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan untuk tahun 2020 dan 2021

Dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Kab sejauh ini untuk realisasi capaian kinerja hampir keseluruhan dapat terlaksana tetapi ada beberapa permasalahan :

1. Kurang matangnya pada perencanaan awal anggaran sehingga ada beberapa kegiatan PPTK yang tidak dapat terlaksana. Untuk mengatasi hal – hal dimaksud dilakukan pembinaan dan membuat rencana aksi sekaligus time schedule dan rencana biaya tiap kegiatan.
2. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dari berbagai media kurang diikuti kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Untuk mengatasi hal dimaksud diadakan pelatihan SDM untuk aplikasi pemerintahan yang diikuti oleh semua Perangkat Daerah mulai dari unsur pimpinan sampai kepada staf.
3. Belum tersusunnya berbagai pedoman pelaksanaan kegiatan, antara lain : Terlambatnya penetapan Pengelola Web pada Masing – masing Perangkat Daerah, Pengelolaan PPID, Pedoman Pengelolaan LPPL.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat dengan format daerah masing-masing, table T-C.30

Tabel T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu**

Indikator	SPM/ standa r nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n- 2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Capaian Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	20 %	25%	30%	45%	20 %	25%	30 %	45%	
Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	7 Layanan	8 Layanan	9 Layanan	10 Layanan	7 Layana n	8 Layanan	9 Layanan	10 Layanan	
Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon	-	-	70 %	78 %	80 %	82 %	70 %	78%	80 %	82 %	

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	-	-	60%	70%	75%	77%	60%	70%	75%	77%	
Proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi	-	-	40%	40%	43%	43%	40%	40%	43%	43%	
Tersedianya Sistem data dan Statistik yang terintegrasi	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
Buku "Kabupaten" dalam Angka	-	-	-	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	
Buku "DPRB"	-	-	-	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	-	-	70%	75%	80%	85%	70%	75%	80%	85%	
Jumlah Aplikasi Pemerintah yang di Kembangkan	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
Jumlah Alat Sandi yang di Kelola	-	-	6	8	8	8	6	8	8	8	

2.3. Isu – isu Penting Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.

Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembangan Komunikasi dan Informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen – elemen dalam tata kelola komunikasi, yakni sumber berita / informasi, penerima berita / informasi, substansi berita / informasi dan saluran berita / informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen – elemen tersebut, ternyata terdapat beberapa isu sebagai berikut :

- a. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu maupun Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, masih terdapat kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat, realibel, lengkap dan benar.
- b. Substansi berita / informasi yang disampaikan masih terdapat kekurangan sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna antara Perangkat Daerah
- c. Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung terselenggaranya pemerintah yang efektif baik dan bersih.
- d. Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi informatika.

Terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik dimasukkan sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik efisien dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintah dan publik berbasis TIK. Namun untuk menerapkan hal ini sangat terkait dengan kesiapan tata kelola pemanfaatannya, Infrastrukturnya , sumber daya aparaturnya dan masyarakat sebagai pengguna (User).

Dalam pengembangan informasi teknologi Kabupaten Luwu tahun 2021 akan mengimplementasikan rencana kegiatan TIK yang tertuang pada Grand Desain TIK yang telah disusun, yaitu :

1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola E- Government
2. Restrukturisasi struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk penguatan peran TIK
3. Perencanaan dan Sosialisasi pengembangan SDM bidang TIK
4. Pengembangan Aplikasi untuk Kluster Industri Pangan, Energi dan Perizinan
5. Menyiapkan Back-up Data
6. Menyusun kebijakan standarisasi data untuk semua Perangkat Daerah
7. Optimalisasi jaringan dan Rekonfigurasi Data Center.

Tuntutan dan sikap prilaku pada kalangan aparatur pemerintahan dan masyarakat dengan diterapkannya E- Government merupakan aspek yang mempunyai resistansi yang cukup besar dan perlu waktu serta proses untuk mengubahnya secara bertahap. Dinas Kominfo yang memiliki fungsi pelayanan publik yakni layanan informasi dan layanan TIK berupaya memberikan pelayanan pada masyarakat yang transparan dan akuntabel dengan demikian pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat terwujud dengan baik sesuai amanat UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang pada akhirnya diharapkan manfaat informasi dapat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi menuju Luwu yang lebih maju dan sejahtera.

Disamping itu guna pencapaian tujuan dan sasaran serta tercapainya indikator meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, perlu diadakan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, yakni lebih menekankan pada fungsi Komunikasi dengan penguatan teknologi dan Informatika.

- Rumusan akar masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis sebagaimana diuraikan di bawah ini.
 1. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. Dari segi SDM, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu masih kekurangan Pegawai PNS sebanyak 26 orang sedangkan dari segi sarana dan prasarana masih sangat kurang, khususnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung teknis kegiatan diseminasi informasi.

2. Belum baiknya tata kelola dan penatausahaan PPID

Tata kelola dan penatausahaan PPID belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan karena kelembagaan PPID baru dibentuk pada tahun 2018 sehingga penyelenggaraan kegiatan belum maksimal. Terkait dengan hal ini pada periode pembangunan ke depan mulai difokuskan pada peningkatan tugas dan fungsi PPID.

3. Masih kurangnya pelibatan masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu partner pemerintah dalam diseminasi informasi belum terbentuk di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu akan memfokuskan pada pembentukan KIM pada tingkat kecamatan.

4. Belum maksimalnya hasil kerja tim media center

Hasil kerja Tim Media Center belum maksimal dikarenakan sarana dan prasaran yang ada belum mendukung. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu akan memfokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan teknis.

5. Masih kurangnya ketersediaan infrastuktur penyelenggaraan pelayanan e-government

Infrastruktur pendukung pelayanan e-government yang ada saat ini belum memadai. Infrastruktur yang masih kurang antara lain jaringan ke perangkat daerah yang belum terbangun secara keseluruhan. Oleh karena itu ke depan pemenuhan ketersediaan infrastruktur menjadi prioritas.

6. Kurangnya pemahaman aparatur dibidang statistik sektoral

Statistik sektoral adalah salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. Dalam hal penyediaan data statistik sektoral belum terlaksana dengan baik karena sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas ini belum terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu ke depan peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang menangani statistik sektoral menjadi fokus perhatian selain penyediaan data.

7. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik aparatur yang memiliki kualifikasi sandi, tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian

Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. Dari segi SDM, Aparatur yang memiliki pemahaman dalam hal persandian untuk pengamanan informasi masih sangat kurang. Selain itu tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian yang ada masih jauh dari standar yang seharusnya. Sehingga untuk periode ke depan urusan persandian difokuskan pada peningkatan sumber daya.

Berbagai permasalahan di atas berpotensi menjadi penghambat Pemerintahan Kabupaten Luwu dalam melakukan proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif serta profesional melalui pemanfaatan TIK dalam penyebaran informasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, apabila permasalahan ini tidak diantisipasi dengan baik, akan berdampak buruk terhadap, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 terutama pada Misi ke 1 'Mewujudkan pemerintah yang professional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.
 2. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni 'Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kabupaten Luwu, baik internal maupun eksternal. Faktor tersebut dapat menunjang dan dapat pula menghambat, sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi agar melahirkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Analisis yang dilakukan berdasarkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia,
- b. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi,
- c. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pita lebar (Palapa Ring),
- d. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi,
- e. Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas,
- f. Tingginya tingkat persaingan antar penyelenggara telekomunikasi dan rendahnya kualitas layanan,
- g. Belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional,
- h. Belum efisiennya proses perizinan spektrum frekuensi radio, dan
- i. Belum terintegrasinya Database dan Layanan e-Government Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Peluang

Peluang yang mendukung untuk lima tahun ke depan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- a) Makin diminatinya transaksi Jual Beli melalui Internet,
- b) Digitalisasi Penyiaran TV berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, infrastruktur industri penyiaran dan membuka peluang usaha baru.

b. Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi lima tahun ke depan untuk DKISP Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- a. Cepatnya perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarana;
- b. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian perdesaan.

2. Peluang

Peluang yang mendukung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a) Dukungan kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Tusi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
- b) Berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan,
- c) Meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk di bidang komunikasi dan informatika.

c. Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- b. Masih adanya tumpang tindih sebagian tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi publik.
- c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan urusan komunikasi informasi dan informatika, statistik dan persandian.
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- e. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur penunjang penyelenggaraan layanan e-government.
- f. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan.
- g. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap keamanan informasi daerah.
- h. Belum optimalnya keterhubungan perangkat daerah dalam Jaring Komunikasi Sandi.
- i. Ketersediaan infrastruktur dalam bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Luwu belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi.
- j. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
- k. Masih terjadi kesenjangan informasi di masyarakat, sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

2. Peluang

Peluang yang mendukung untuk lima tahun ke depan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, yaitu :

- a. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- b. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
- d. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
- e. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.

Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2019-2024 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan agar diseminasi informasi, ketersediaan data statistik sektoral dan keamanan informasi dapat tercapai. Maksud dari peningkatan kualitas adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang

menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

2. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wajib diketahui oleh masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid. Terkait dengan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melakukan perbaikan kualitas diseminasi informasi dengan meningkatkan sumber daya internal dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat.

3. Optimalisasi pelayanan e-Government

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain peningkatan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, pemanfaatan TIK untuk dapat memberikan kemudahan kepada aparatur maupun masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya juga menjadi tuntutan berbagai kalangan pada masa ini. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur e-government menjadi suatu keharusan.

4. Optimalisasi penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral

Data statistik sektoral merupakan suatu yang sangat penting dan mendasar bagi seorang kepala daerah dalam mengambil kebijakan agar kebijakan yang diambil tepat guna dan sasaran. Ketersediaan data

statistik sektoral menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

5. Optimalisasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data / informasi pemerintah daerah

Pengamanan informasi merupakan pengembangan dari penyelenggaraan persandian. Hal ini dikarenakan tuntutan perubahan zaman yang begitu cepat khususnya dalam hal cyber. Berbagai kejadian yang terjadi dimana banyaknya data-data pemerintah dan masyarakat yang dirusak dan atau diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sudah sangat meresahkan sehingga keamanan data dan informasi harus menjadi prioritas. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai perangkat daerah yang menangani urusan tersebut dituntut untuk dapat mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan meningkatkan sumber daya.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami kenaikan pagu dan rancangan awal RKPD, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya masih minimnya anggaran tiap kegiatan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berimbas pada pelayanan dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak berjalan maksimal sesuai yang direncanakan. Adapun program dan kegiatan tersebut sudah sesuai namun besaran pagu terjadi peningkatan pagu yang nantinya yang akan dipilah sesuai dengan skala prioritas dengan tiap bidang dalam mengelola program yang akan dijabarkan dan dilaksanakannya.

Alasan Proses dilakukan karena tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang semakin kompleks yang dengan sendirinya menuntut kinerja dan pelayanan maksimal sehingga rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengalami peningkatan dari rancangan pagu sebelumnya

Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu disusun dengan memperhatikan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang telah disusun dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan disajikan dalam tabel TC.31 Sebagai Berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA		Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.338.795.474	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA		Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.573.320.853	
2.16.01.2.01	Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah	Belopa	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Secara Tepat Waktu	100 %	27.053.260	Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah	Belopa	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan secara tepat Waktu	100 %	70.475.000	
2.16.01.2.01	01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	18.074.350	01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan	2 Dokumen	37.250.000	

								renstra dan Renja yang disusun			
2.16.01.2.01	02.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DKISP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.724.500	02.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DKISP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	12.725.000	
2.16.01.2.01	07.Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kantor DKISP	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan program/Kegiatan yang disusun	4 Dokumen	5.254.410	07.Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang disusun	4 Dokumen	20.500.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	2.793.188.553	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	2.805.526.253	
2.16.01.2.02	01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DKISP	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	2683 OB	2.787.526.253	01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DKISP	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	2683 OB	2.787.526.253	
2.16.01.2.02	05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	2.569.000	05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan yang disusun	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	13.000.000	

2.16.01.2.02	07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kantor DKISP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	3.088.300	07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kantor DKISP	Jumlah Laporan keuangan Bulanan Bulanan/Triwulan/Semesteran	14 Laporan	15.000.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Orang	44.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Orang	80.000.000	
2.16.01.2.05	09.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 Orang	44.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Formal	2 Orang	80.0000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	266.620.410	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	250.000.000	
2.16.01.2.06	01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	5.754.000	01.Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	22.600.000	

2.16.01.2.06	02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 Unit	94.630.900	02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	110.000.00	
2.16.01.2.06	05.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	5.000.120	05.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	12.000.000	
2.16.01.2.06	06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	4 Jenis	5.000.000	06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	3 Jenis	20.000.000	
2.16.01.2.06	07.Penyediaan Bahan/Material	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Bahan/Material Kebutuhan Kantor yang disediakan	25 jenis	9.814.550	07.Penyediaan Bahan/Material	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Bahan/Material Kebutuhan Kantor yang disediakan	25 Jenis	18.000.000	
2.16.01.2.06	08.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	3 Jenis	7.999.890	08.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DKISP	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	3 Jenis	15.000.000	
2.16.01.2.06	09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	42 OK	188.420.950	09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DKISP	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah	42 OK	350.000.000	

2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	251.358.701	Penunjang Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	289.900.000	
2.16.01.2.08	01.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DKISP	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	400 Surat	8.400.000	01.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DKISP	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	400 Surat	14.400.000	
2.16.01.2.08	02.Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor DKISP	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon,Air dan Listrik	12 Bulan	24.323.101	02.Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon,Air dan Listrik	12 Bulan	25.500.000	
2.16.01.2.08	04.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor DKISP	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Jenis	218.635.600	04.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Jenis	250.000.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.960.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	77.419.600	
2.16.01.2.09	02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor DKISP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	2 Unit	34.467.450	02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kantor DKISP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan	4 Unit	42.419.600	

						Lapangan		Pemeliharaan rutin/berkala			
2.16.01.2.09	09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor DKISP	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	11 m2	15.000.000	09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	11 m2	25.000.000	
2.16.01.2.09	10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor DKISP	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6 Unit/Set	1.493.000	10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor DKISP	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6 Unit/Set	10.000.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab.Luwu Belopa	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa	35 %	1.569.471.320	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab.Luwu Belopa	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa	35 %	3.208.743.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten	91 %	1.569.471.320	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten	91 %	3.208.743.000	
2.16.02.2.01	01.Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab.Luwu Belopa	Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi	5 Dokumen	20.921.720	01.Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab.Luwu Belopa	Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis Bidang	5 Dokumen	48.400.000	

			Publik					Informasi dan Komunikasi publik			
2.16.02.2.01	06.Pelayanan Informasi Publik	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Jenis Informasi Publik yang diberikan Pelayanan	3 Jenis	54.109.840	06.Pelayanan Informasi Publik	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Jenis Informasi Publik yang diberikan Pelayanan	3 Jenis	85.500.000	
2.16.02.2.01	07.Layanan Hubungan Media	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Media yang dilayani	20 Media	1.000.000.000	07. Layanan Hubungan Media	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Media yang dilayani	20 Media	2.000.000.000	
2.16.02.2.01	10.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Laporan	76.624.540	10.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Laporan	210.015.000	
2.16.02.2.01	11.Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kab.Luwu Belopa	Laporan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	12 Laporan	7.499.600	11.Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kab.Luwu Belopa	Laporan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	12 Laporan	20.500.000	
2.16.02.2.01	12.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Kab.Luwu Belopa	Laporan Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	4 Laporan	410.315.620	12.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Kab.Luwu Belopa	Laporan Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	4 Laporan	844.328.000	

2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Aplikasi dalam rangka e-Gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	1 Aplikasi	656.986.600	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Aplikasi dalam rangka e-Gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	1 Aplikasi	3.110.000.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	90 %	656.986.600	Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan e-Government dilingkup Pemda Kabupaten	90 %	3.110.000.000	
2.16.03.2.02	03.Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Terkoneksi dengan Pusat Data/Ruang Server Monitoring jaringan Informasi	35 PD	367.220.600	03.Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Terkoneksi dengan Pusat data/Ruang Server Monitoring jaringan informasi	35 PD	2.642.800.000	
2.16.03.2.02	07.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Aplikasi yang dikelola, Webside yang dikelola, Perangkat Lunak dan Aplikasi	2 Aplikasi	289.766.000	07.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Aplikasi yang dikelola, website yang dikelola, Perangkat Lunak dan	2 Aplikasi	467.200.000	

			yang diperbaiki,Pengadaa n Hardware untuk Aplikasi e- Gov,Pembangunan/ Pengembangan/Red esain Aplikasi					Aplikasi yang diperbaiki,Penga daan Hardware untuk aplikasi e- Gov,Pembangun an/Pengembang an/Redesain aplikasi			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab.luwu Belopa	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	45 %	54.697.530	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab.Luwu Belopa	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	45 %	150.920.0 00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Sistem Data dan Statistik Sektoral	45 %	54.697.530	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/kota	Kab.Luwu Belopa	Sistem Data dan Statistik Sektoral	45 %	150.920.0 00	
2.20.02.2.01	01.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,An alisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi,pengum pulan,pengolahan ,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Laporan	26.873.200	01.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolah an,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan,P engolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Laporan	44.300.00 0	
2.20.02.2.01	03.Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Metadata Statistik Sektoral yang dibangun	1 Metadata	5.240.400	03.Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Metadata Statistik Sektoral yang dibangun	1 Metadat a	30.200.00 0	

2..20.02.2.01	04.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1 Laporan	21.419.330	04.Peningkatan kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1 Laporan	70.250.000	
2.20.02.2.01	06.Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di daerah	1 Laporan	1.164.600	06.Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di daerah	1 Laporan	7.170.000	
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab.Luwu Belopa	Indeks Kematangan Keamanan Informasi(MAKI)	100 %	55.685.940	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab.Luwu Belopa	Indeks Kematangan Keamanan Informasi(MAKI)	Level I	223.334.400	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten	100 %	55.685.940	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	223.334.400	
2.21.02.2.01	01.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunkaasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	14.716.990	01.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring	1 Dokumen	60.150.000	

			Kabupaten/Kota					Komunikasi Sandi Pemerintah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.01	02.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dokumen	9.708.500	02.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab.Luwu Belopa	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dokumen	50.500.00 0	
2.21.02.2.01	03.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	23.045.680	03.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	43.250.00 0	
2.21.02.2.01	04.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang disediakan	1 Jenis	8.214.770	04.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Kabupaten yang disediakan	1 Jenis	69.434.40 0	

2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Indeks Kematangan Keamanan informasi (MAKI)	Level I	31.039.990	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab.Luwu belopa	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Level I	212.034.000	
2.21.02.2.02	01.Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	4 Laporan	31.039.990	01.Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Laporan Pelaksanaan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	4 Laporan	212.034.000	
			JUMLAH		5.801.307.754			JUMLAH		10.266.048.253	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Usulan masyarakat pada Musrembang Kecamatan yang ditujukan kepada perangkat daerah yang membidangi fasilitasi pengadaan tower jaringan seluler dengan melihat usulan masyarakat yang sangat urgen dan sangat memerlukan perhatian berdasarkan skala prioritas.

Kesesuaian usulan yang dimaksud dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni memberikan pelayanan dan pemerataan informasi serta pemenuhan hak publik akan informasi dapat terwujud dengan baik. Keterkaitan dengan kesesuaian usulan tersebut dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sangat sejalan yakni informasi dan komunikasi publik untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat Pada Tabel TC.32 Sebagai Berikut:

Tabel TC.32

**Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Tahun
2021 Kabupaten Luwu.**

**Nama Perangkat Daerah :Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian**

N O	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Pengadaan Tower Jaringan Seluler	1. Desa Lange dan Desa Sinaji, Kecamatan Bastem	Terkoneksinya Jaringan Informasi & Komunikasi Pelayanan Publik	2 Menara Tower	
		2. Bukit Sutra, Kecamatan Larompong		1 Menara Tower	
		3. Desa Bonelemono, Kecamatan Bajo Barat		1 Menara Tower	

	4. Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat		1 Menara Tower	
	5. Desa Tampumia dan Desa Padang Makmur, Kecamatan Bupon		2 Menara Tower	
	6. Desa Tampa, Kecamatan Ponrang		1 Menara Tower	

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mengacu kepada kebijakan nasional membangun sektor telekomunikasi dan tata kelola internet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika masalah sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan ekonomi digital dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kondisi lokal dan penggunaan teknologi yang sudah dibangun. Dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu berupaya memasukkan dalam program/kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu telah merumuskan strategi pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberian informasi pada masyarakat dengan Pemerintah secara transparan dan efisien
2. Menyediakan sistem informasi berbasis elektronik agar tercipta proses kerja yang transparan, efisien dan mudah diakses.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dan Implementasi atas pernyataan misi I RPJMD perlu dirumuskan tujuan sebagai sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuannya berdasar misi I adalah mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel.

3.2.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, seperti tertuang dalam Renstra 2019 - 2024 adalah sasaran I - V yakni :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan
2. Terpenuhinya Administrasi perkantoran
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)

4. Terpenuhinya SDM sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan
5. Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi dalam hubungan komunikasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu sesuai analisa kebutuhan untuk tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu melaksanakan 5 program dan 37 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan / Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Penguatan Tata Kelola Informasi Di Daerah
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

3. Program Aplikasi Informatika

- 1) Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
 - Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab / Kota.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Luwu Belopa	100 %		APBD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
2.16.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	Kab.Luwu Belopa	100 %	27.053.900			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.250.000
2.16.01.201.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang Disusun	Kab.Luwu Belopa	2 Dokumen	18.074.350	APBD		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.250.000
2.16.01.201.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kab.Luwu Belopa	1 Dokumen	3.724.500	APBD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.500.000
2.16.01.201.07	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang disusun	Kab.Luwu Belopa	4 Dokumen	5.254.410	APBD		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.500.500

2.16.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	100 %	2.793.183.553	APBD		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.345.247.463
2.16.01.202.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kab.Luwu Belopa	31 Orang	2.787.526.253	APBD		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.327.047.463
2.16.01.202.05	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Luar Kab. Luwu	1 Laporan	2.569.000	APBD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
2.16.01.202.07	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Kab. Luwu Belopa	14 Laporan	3.088.300	APBD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.200.000
2.16.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	100 %	44.250.000	APBD		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.500.000
2.16.01.205.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab.Luwu Belopa	2 Orang	44.250.000	APBD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.500.000
2.16.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	100 %	171.989.510	APBD		Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.000.000
2.16.01.206.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab.Luwu Belopa	12 Jenis	5.754.000	APBD		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
2.16.01.206.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Kab.Luwu Belopa	12 Jenis	94.630.000	APBD		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000
2.16.01.206.05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Luwu Belopa	3 Jenis	5.000.120	APBD		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000
2.16.01.206.06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Kab.Luwu Belopa	3 Jenis	5.000.000	APBD		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000

2.16.01.206.07	5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kantor yang disediakan	Kab.Luwu Belopa	25 Jenis	9.814.550	APBD		Penyediaan Bahan/Material	20.000.000
2.16.01.206.08	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makanan yang disediakan	Kab.Luwu Belopa	3 Jenis	7.999.890	APBD		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000
2.16.01.206.09	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab.Luwu Belopa	42 OK	188.420.950	APBD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000
2.16.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	100 %	251.358.701	APBD		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.250.000
2.16.01.208.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	Kab.Luwu Belopa	400 Surat	8.400.000	APBD		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.750.000
2.16.01.208.02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kab.Luwu Belopa	12 Bulan	24.323.101	APBD		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	34.500.000
2.16.01.208.04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor	Kab.Luwu Belopa	OB	218.635.600	APBD		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000
2.16.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Luwu Belopa	75%	50.960.450	APBD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000
2.16.01.209.02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Kab.Luwu Belopa	4 Unit	34.467.450	APBD		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000
2.16.01.209.09	2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kab.Luwu Belopa	11 m2	15.000.000	APBD		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000
2.16.01.209.10	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Kab.Luwu Belopa	1 Tahun	1.493.000	APBD		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000

2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik	Kab.Luwu Belopa	100 %	1.569.471.320	APBD		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.623.074.700
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Kab.Luwu Belopa	35 %	1.569.471.320	APBD		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.623.074.700
2.16.02.2.01.01	1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab.Luwu Belopa	5 Dokumen	20.921.720	APBD		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	146.132.900
2.16.02.2.01.06	2 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah jenis Informasi Publik yang diberikan pelayanan	Kab.Luwu Belopa	3 Jenis	54.109.840	APBD		Pelayanan Informasi Publik	141.030.000
2.16.02.2.01.07	3 Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang Dilayani	Kab.Luwu Belopa	20 Media	1.000.000.000	APBD		Layanan Hubungan Media	1.700.000.000
2.16.02.2.01.10	4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Luwu Belopa	1 Laporan	76.624.540	APBD		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.000.000.000
2.16.02.2.01.11	5 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab.luwu Belopa	12 Laporan	7.499.600	APBD		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	135.911.800
2.16.02.2.01.12	6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Laporan Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Kab.Luwu Belopa	4 Laporan	410.315.620	APBD		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	500.000.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi dalam rangka e-govyang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	Kab.Luwu Belopa	1 Aplikasi	656.986.600	APBD		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	800.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab.Luwu Belopa	90 %	656.986.600	APBD		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000

2.16.03.2.02.03	1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah terkoneksi dengan Pusat Data/Ruang Server Monitoring Jaringan Informasi	Kab.Luwu Belopa	35 OPD	367.220.600	APBD		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	450.000.000
2.16.03.2.02.07	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikelola ,Website yang dikelola ,perangkat lunak dan aplikasi yang diperbaiki,pengadaan Hardware untuk aplikasi e-gov,pembangunan/pekerjaan/mbangan/redesain aplikasi	Kab.Luwu Belopa	2 Aplikasi	289.766.000	APBD		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	350.000.000
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Sistem Data Statistik yang terintegrasi	Kab.Luwu Belopa	45 %	54.697.530	APBD		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	269.350.000
2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggraan statistik sektoral	Kab.Luwu Belopa	66 %	54.697.530	APBD		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	269.350.000
2.20.02.2.01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan ,Analisis dan Diseminasi Data statistic Sektoral	Kab.Luwu Belopa	4 Laporan	26.872.200	APBD		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	130.500.000
2.20.02.2.01.03	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Metadata Sektoral yang dibangun	Kab.Luwu Belopa	1 Metadata	5.240.400	APBD		Membangun Metadata Statistik Sektoral	53.350.000
2.20.02.2.01.04	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Laporan	21.419.330	APBD		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	40.000.000
2.20.02.2.01.06	4	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab.Luwu	Laporan	1.164.600	APBD		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	45.500.000
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Informasi (MAKI)	Kab.Luwu Belopa	Level I	86.725.930	APBD		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	95.398.523

2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab.Luwu Belopa	100 %	55.685.940	APBD		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	61.254.534
2.21.1.02.2.01.0 1	1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditetapkan	Kab.Luwu Belopa	1 Dokumen	14.716.990	APBD		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.188.689
2.21.1.02.2.01.0 2	2 Pelaksanaan AnalisisKebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	1 Dokumen	9.708.500	APBD		Pelaksanaan AnalisisKebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.679.350
2.21.1.02.2.01.0 3	3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab.Luwu belopa	1 Laporan	23.045.680	APBD		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25.350.248
2.21.1.02.2.01.0 4	4 Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang disediakan	Kab.luwu Belopa	1 Jenis	8.214.770	APBD		Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.036.247
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pola Hubungn Komunikasi Sandi Antar Perangkat daerah	Kab.Luwu Belopa	100 %	31.039.990	APBD		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat DaerahKabupaten/Kota	34.143.989
2.21.02..2.02.01	1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab.Luwu Belopa	4 Laporan	31.039.990	APBD		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.143.989
JUMLAH					5.801.307.754				9.111.570.686

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Tahun 2021			
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.338.795.474	Kab.Luwu Belopa	APBD Kab
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	27.050.920	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	18.074.350	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.724.500	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan yang disusun	4 Dokumen	5.252.070	Kab. Luwu	APBD Kab
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.793.183.553	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	2682 OB	2.787.526.253	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	2.569.000	Kab. Luwu	APBD Kab

	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran yang disusun	14 Laporan	3.088.300	Kab. Luwu	APBD Kab
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ASN dengan predikat Kinerja Baik	100 %	44.250.000	Kab.Luwu	APBD Kab
	-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	44.250.000	Kab. Luwu	APBD Kab
4	-Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	266.620.410	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diisediakan	12 Jenis	5.754.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	94.630.900	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	5.000.120	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	3 Jenis	5.000.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Jenis/Bahan Maaterial Kebutuhan Kantor yang Disediakan	25 Jenis	9.814.550	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang Disediakan	3 Jenis	7.999.890	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	42 OK	188.420.950	Kab. Luwu	APBD Kab
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	251.358.701	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Diregistrasi	400 Surat	8.400.000	Kab. Luwu	APBD Kab

	-Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon,Air dan Listrik	12 Bulan	24.323.101	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	OB	218.635.600	Kab. Luwu	APBD Kab
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50.960.450	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	34.467.450	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaan	11 m2	15.000.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	1.493.000	Kab. Luwu	APBD Kab
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	91,6 %	1.569.471.320	Kab. Luwu	APBD Kab
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Komunikasi Informasi Daerah dan Media Massa	35 %	1.569.471.320	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5 Dokumen	20.921.720	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jenis Informasi Publik yang Diberikan Pelayanan	3 Jenis	54.109.840	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang Dilayani	20 Media	1.000.000.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	76.624.540	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi daerah	Laporan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	12 Laporan	7.499.600	Kab. Luwu	APBD Kab

	-Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Laporan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	4 Laporan	410.315.620	Kab.Luwu	APBD Kab
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Kabupaten	90,9 %	656.986.600	Kab. Luwu	APBD Kab
1	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	1 Aplikasi	656.986.600	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Terkoneksi dengan Pusat Data/Ruang Server Monitoring Jaringan Informasi	35 PD	367.220.600	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikelola ,Website yang dikelola,Perangkat Lunak dan Aplikasi yang diperbaiki ,Pengadaan Hardware untuk Aplikasi e-gov,Pembangunan/Pengembangan/Redesain Aplikasi	2 Aplikasi	289.766.000	Kab. Luwu	APBD Kab
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten	66,6 %	54.679.530	Kab. Luwu	APBD Kab
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	45 %	54.679.530	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan ,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	4 Laporan	26.873.200	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Membangun Metadata Statistik Sektoral	Metadata Statistik Sektoral yang Dibangun	1 Metadata	5.240.400	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Laporan	21.419.330	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di daerah	Laporan	1.164.600	Kab. Luwu	APBD Kab

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	86.725.930	Kab. Luwu	APBD Kab
	1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100 %	55.685.940	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	1 Dokumen	14.716.990	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dokumen	9.708.500	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berkas Elektronik dan Non Elektronik	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	23.045.680	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Disediakan	1 Jenis	8.214.770	Kab. Luwu	APBD Kab
	2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kematangan Informasi (MAKI)	Level I	31.039.990	Kab. Luwu	APBD Kab
	-Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	4 Laporan	31.039.990	Kab. Luwu	APBD Kab
		JUMLAH		5.801.307.754		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Dalam hal pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan Seluruh Staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Tahun 2021, maka akan dipergunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belopa, Januari 2021
**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu**

ANWAR USMAN, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198512 1 032

